



# Pembelajaran untuk Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan

Rachma Nurbani

Peneliti Senior, The SMERU Research Institute

**LOKAKARYA PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA  
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN**

Balai Tawang Arum - Surakarta, 29 Maret 2016





# Tantangan Kemiskinan Perkotaan

## Di Dunia:

- Persentase penduduk perkotaan: 30% (1950), 54% (2014)
- Urbanisasi tercepat terjadi di negara-negara berpendapatan menengah-bawah (*lower-middle income countries*) di Asia dan Afrika.
- Separuh penduduk perkotaan dunia tinggal di 7 negara, termasuk Indonesia.

## Di Indonesia:

- Penduduk yang tinggal di perkotaan: 53% (2015), 67% (prediksi untuk 2035)
- Jumlah penduduk miskin perkotaan: 9,5 juta jiwa (1980), 10,5 juta jiwa (2014)
- Prediksi untuk 2020: kemiskinan perkotaan > kemiskinan perdesaan

Sumber: United Nations (2014), PSF (2013), BPS (2014).

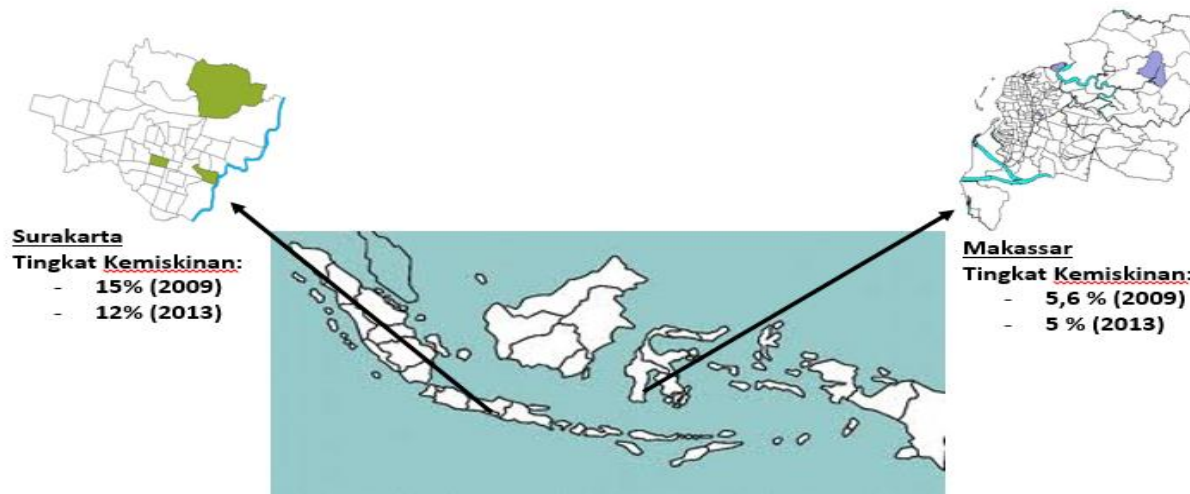
- **Urbanisasi -> konsekuensi terhadap kemiskinan perkotaan**
- Diperlukan upaya lebih besar untuk mengatasi kemiskinan di perkotaan
- **Integrasi antara aspek spasial dengan aspek sosial-ekonomi**





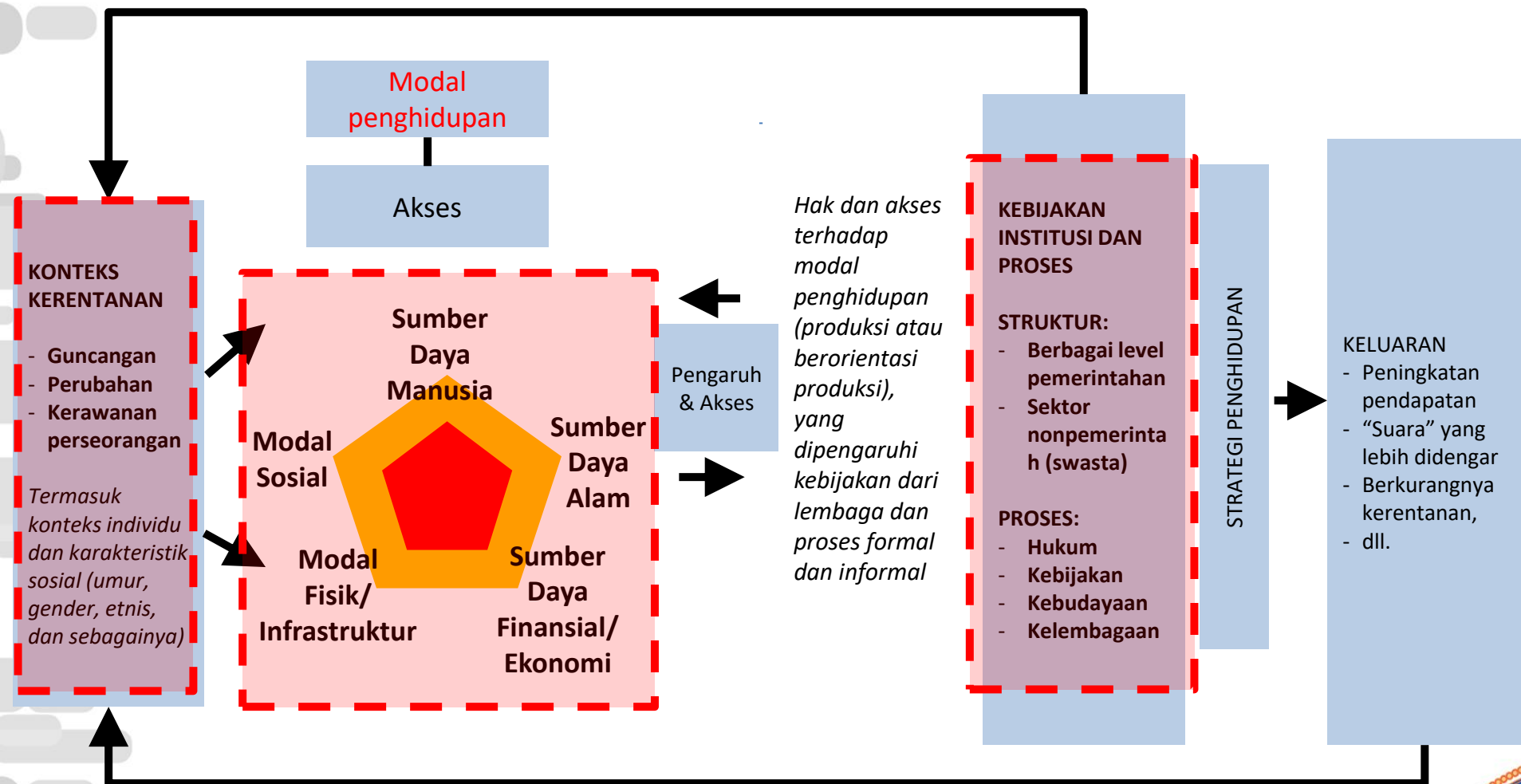
# Studi Kemiskinan Perkotaan: Metodologi

- **Pertanyaan Penelitian:**
  - Bagaimana perencanaan spasial perkotaan (termasuk perencanaan pembangunan secara umum dan tata ruang) mengakomodasi upaya penanggulangan kemiskinan?
  - Se jauh mana perencanaan perkotaan **menemukenali** berbagai persoalan kemiskinan?
- **Lokasi** → di 2 kota: Surakarta dan Makassar; masing-masing 3 kelurahan
- **Tahapan:**
  - Pemetaan pemangku kepentingan utama (Januari–Februari 2011)
  - Kajian kemiskinan partisipatoris di tingkat komunitas (Maret–April 2011)
  - Lokakarya partisipatoris dan diseminasi hasil penelitian (November 2011)





# Kerangka Penelitian: Kerangka Penghidupan Berkelanjutan dari DFID



Diadaptasi dari Carney, et al. (1999)





# Profil Kemiskinan: Modal Penghidupan Masyarakat Miskin

## Modal Manusia

- Peningkatan capaian pendidikan masyarakat miskin, meskipun masih lebih rendah daripada masyarakat umum
- Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan: jaminan kesehatan nasional dan daerah

## Modal Alam

- Akses rendah, terutama di daerah pinggir laut dan sungai
- Di daerah dalam kota: ruang yang terbatas;
- Akses agak lebih baik di daerah pinggiran kota daripada di dalam kota
- Penurunan kualitas lingkungan

## Modal Keuangan

- Akses rendah di semua daerah, karena status pekerjaan informal dan serabutan
- Tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal

## Modal Fisik

- **Perbaikan kondisi jalan dan sanitasi, kecuali di daerah pinggir laut dan sungai**
- Akses terhadap listrik dan air bersih terbatas, khususnya di daerah dengan konsentrasi kemiskinan tinggi

## Modal Sosial

- Secara konsisten tinggi di semua daerah: jaring pengaman sosial di antara anggota masyarakat



# Sumber Kerentanan Masyarakat Miskin

- Spasial dan nonspasial

## Perubahan (*trend*)

Peningkatan pertumbuhan penduduk, dan migrasi dari daerah sekitar  
Penurunan kualitas lingkungan alam: pinggir laut dan sungai  
Peningkatan harga barang/jasa kebutuhan hidup

## Faktor Musiman

Alam: musim hujan, perubahan cuaca yang makin tak terduga  
Sosial budaya: hari raya, **musim menikah**, **tahun ajaran baru (sekolah)**

## Guncangan (*shock*)

Krisis keuangan global 2008/09  
Banjir, kebakaran, pengusuran  
Skala individu/RT: sakit

DAMPAK

Berkurangnya kesempatan untuk mengakumulasi asset/modal dan menabung

DAMPAK

Meningkatnya persaingan dalam mencari pekerjaan  
Makin terancamnya **modal penghidupan**  
Menurunnya kualitas hidup dan kesejahteraan

DAMPAK

Mengancam, bahkan menghancurkan **modal penghidupan** yang ada

### Dampak lanjutan:

- Kerentanan finansial → berutang, dan kesulitan untuk mengakses pendidikan tinggi untuk anak-anak
- Kerentanan pada aspek fisik (terutama kondisi tempat tinggal) → ancaman terhadap kesehatan
- Akumulasi semua bentuk kerentanan → kondisi psikologis (mudah depresi)





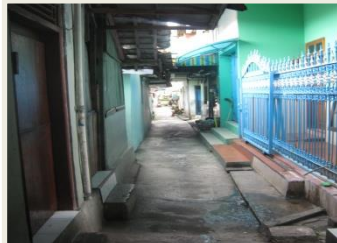
# Kerentanan Spasial: Faktor-faktor yang Memengaruhi

## Daerah pinggir laut/sungai



- Penurunan kualitas SDA
- Lahan ilegal
- Kurangnya sarana sanitasi dan air bersih

## Daerah tengah kota



- Risiko kebakaran
- Kurangnya ruang publik
- Status tempat tinggal (Magersari di Solo)

## Daerah pinggir kota



- Status tempat tinggal
- Ketiadaan sistem pembuangan sampah dan sistem sanitasi yang baik
- Kurang terjangkau layanan dasar perkotaan (listrik dan air bersih)



# Sumber Dukungan dan Aktor Kunci

## Tingkat Lokal/Masyarakat

Aparat di tingkat lokal (RT, RW, kelurahan)

Layanan dasar dan kader (posyandu, PKK)

Sumber dukungan keuangan informal (*bank titil*, koperasi keliling, rentenir, warung)

Formal (pegadaian)

## Pemerintah Kota

Kantor Walikota

Bappeda

Dinas-dinas teknis

TKPKD

## Pemerintah Pusat

Program Pemerintah Pusat:  
PNPM

Organisasi nonpemerintah:  
JICA  
Solo Kota Kita  
Kupas

- Bappeda memegang peran kunci dalam perencanaan
- TKPKD: potensi peran penting (salah satunya sebagai **forum bertemunya aktor pemerintah dan nonpemerintah**), tetapi masih kurang optimal
- Kalangan nonpemerintah: fokus pada intervensi langsung, cakupan terbatas
- Terlepas dari berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang ada, masyarakat lebih banyak mengakses sumber dukungan informal







# Keterkaitan Perencanaan Tata Ruang dan Penanggulangan Kemiskinan: Isu Kunci

1. Kaitan antara perencanaan spasial (tata ruang) dan penanggulangan kemiskinan masih terbatas dan lemah
  - **Belum terintegrasi di dalam dokumen-dokumen perencanaan penting** (RTRW; RPJMD; dan Dokumen Perencanaan SKPD)
  - Belum ada data spasial lokasi kemiskinan yang resmi dan terintegrasi
2. Egosektoral SKPD dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan
  - Pengetahuan yang terbatas mengenai isu-isu kemiskinan (terutama SKPD di luar Bappeda, Dinsos, dan BPM)
  - Lebih memprioritaskan isu sektoral
  - Kurang koordinasi (peran koordinasi TKPKD masih terbatas dan masih menghadapi kendala)
3. Inisiatif penanggulangan kemiskinan masih sangat programatis
  - Program bersifat sektoral
  - Advokasi oleh organisasi nonpemerintah: terfokus pada anggaran, belum banyak menyentuh aspek spasial (**kecuali Mini Atlas Solo Kota Kita**)
4. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan kebijakan sangat minim
  - Sikap skeptif masyarakat, dominasi elite
  - Potensi forum musrenbang

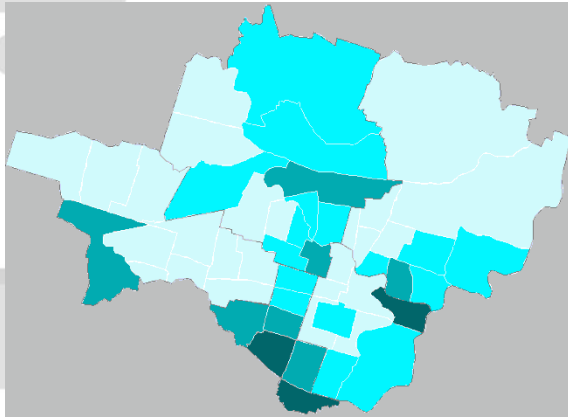


# Tantangan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Surakarta

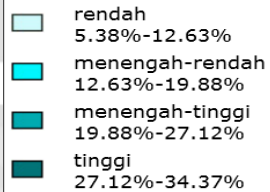


# Peta Kemiskinan Surakarta per Kelurahan

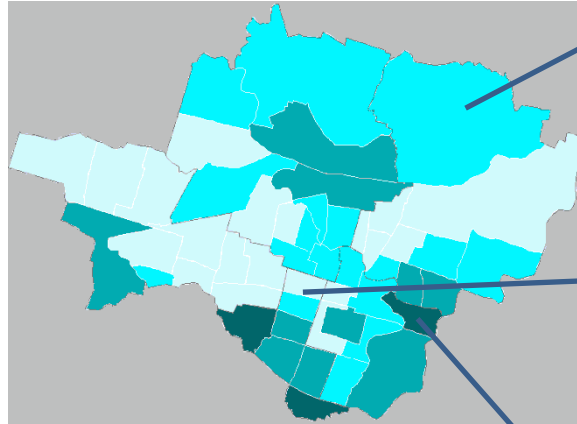
GKN 2010



Tingkat Kemiskinan (GKN)-2010



GKN \$2 (2010)



Tingkat Kemiskinan (2PPP)-2010



## Hasil Asesmen Kemiskinan Partisipatoris 2011

### Mojosongo

**Lokasi :** pinggir kota (*peri-urban*)  
**Penghidupan masyarakat:** pekerja sektor informal, pemulung  
**Ruta miskin (2011):** 20%

### Kemlayan

**Lokasi:** tengah kota  
**Penghidupan masyarakat.:** pekerja sektor informal, pedagang kaki lima, tukang parkir  
**Ruta miskin (2011):** 41%

### Sangkrah

**Lokasi:** pinggir Sungai Bengawan Solo  
**Penghidupan masyarakat.:** pekerja sektor informal, pemulung  
**Ruta miskin (2011):** 51%

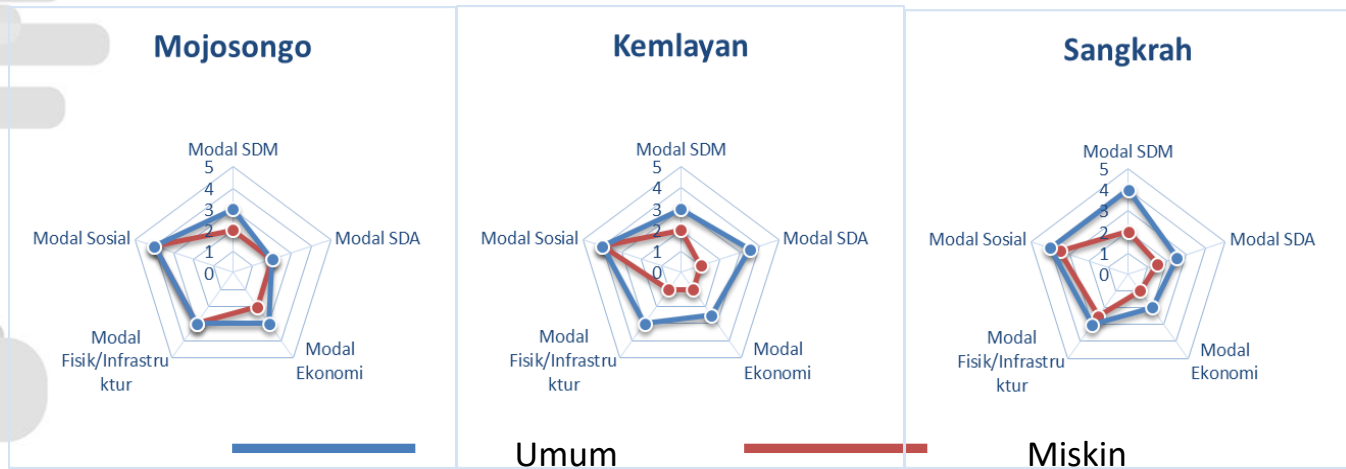
Sumber: [www.indonesiapovertymap.org](http://www.indonesiapovertymap.org)

- Lapangan pekerjaan utama penduduk miskin: perdagangan (30%), industri pengolahan (22%), jasa kemasyarakatan (16%)
- Perdagangan dan industri pengolahan: Surakarta > rata-rata kota nasional
- Industri pengolahan: Surakarta > Jawa Tengah
- Lapangan pekerjaan utama penduduk miskin Jawa Tengah: pertanian (Susenas, 2014)

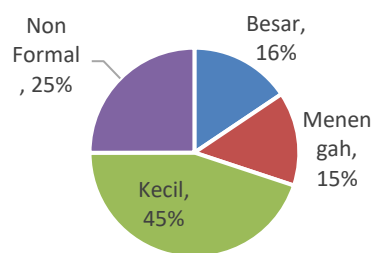




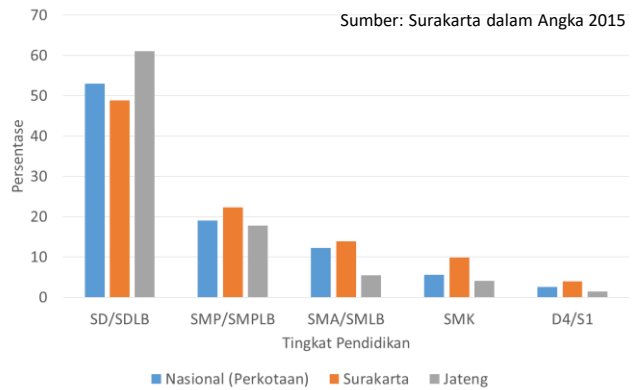
# Modal Penghidupan Masyarakat



**Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Skala Industri, 2014**



- Kondisi dan akses terhadap modal penghidupan: masyarakat miskin < umum
- Modal sosial secara konsisten tinggi: antarkelompok kesejahteraan dan antarwilayah
- Jaminan kesehatan dan pendidikan daerah: PKMS dan BPMKS → SDM miskin < umum
- Pendidikan yang cukup tinggi tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan
- Penyerapan tenaga kerja: industri kecil dan nonformal > menengah dan besar



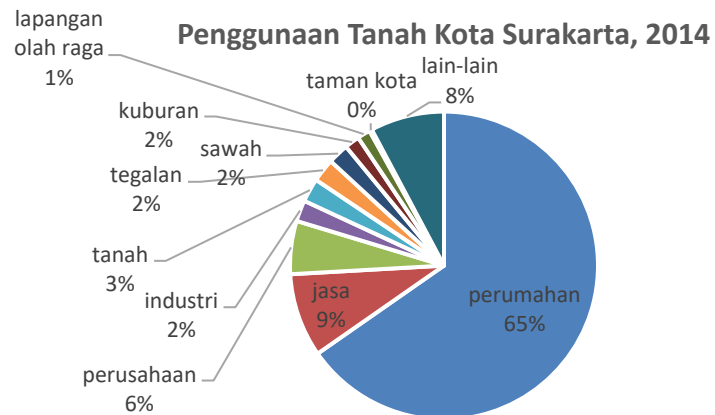
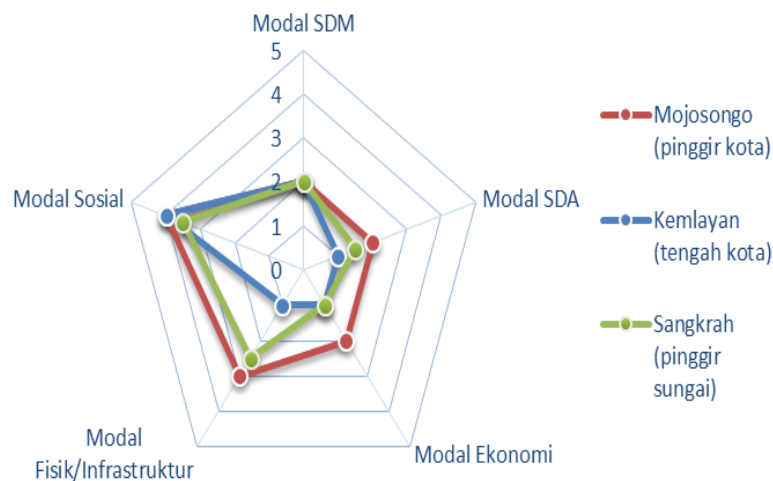
Sumber: Susenas 2014





# Tantangan Spasial Penanggulangan Kemiskinan di Surakarta

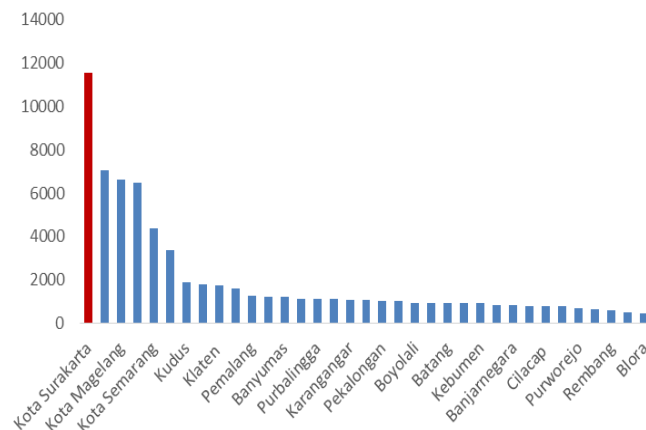
## Modal Penghidupan Kelompok Miskin



Sumber: Surakarta dalam Angka 2015

- Isu spasial: Mojosongo (kawasan baru pembangunan, tujuan relokasi); Kemlayan (*magersari*, ruang terbatas); Sangkrah (kantong kemiskinan, banjir, relokasi)
- Aspek spasial kemiskinan (antarwilayah): tidak terlihat perbedaan berarti di antara modal SDM dan modal sosial, tetapi terdapat perbedaan dalam modal fisik, ekonomi, dan SDA
- Keterbatasan ruang → kepadatan tertinggi di Jawa Tengah; Kecamatan Serengan (Kemlayan) → terpadat di Surakarta

### Kepadatan Penduduk Jawa Tengah per Km<sup>2</sup>, 2013



Sumber: Jawa Tengah dalam Angka 2014





# Implikasi Kebijakan

- Untuk meningkatkan efektivitas program dan mengurangi kerentanan masyarakat miskin, perencanaan program penanggulangan kemiskinan perkotaan harus didasarkan atas analisis kondisi spasial dan penghidupan  
→ Rencana tata ruang yang lebih inklusif terhadap masyarakat miskin; perbaikan daerah kumuh
- Data kemiskinan perlu lebih komprehensif, mencakup aspek spasial  
→ peta kemiskinan, peta kerentanan (cakupan Solo Raya)
- Skema perlindungan sosial harus lebih mampu **menemukenali** faktor kerentanan masyarakat miskin
- Koordinasi pembangunan dan upaya penanggulangan kemiskinan antardaerah (Solo Raya)  
→ Surakarta sebagai pusat perdagangan dan jasa (fokus pembangunan untuk meningkatkan nilai tambah sektor ekonomi utama agar bisa meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja miskin—perdagangan dan jasa)



# Terima Kasih



## Anggota Tim Studi Kemiskinan Perkotaan:

Rizki Fillaili (Koordinator)  
R. Justin Sodo  
Prio Sambodho  
Rachma Nurbani  
Herry Widjanarko  
Kartawijaya  
Abdul Ghofur  
Rika Kumala Dewi  
Mona Sintia  
Ratri Indah Septiana

## Anggota Tim Data Kemiskinan Surakarta:

Widjajanti Isdijoso (Koordinator)  
Nurmala Selly Saputri  
Cecilia Marlina

[www.smeru.or.id](http://www.smeru.or.id)



@SMERUInstitute



The SMERU Research Institute



SMERU Research Institute



SMERU Research Institute

